

Personalisasi Politik dalam Pemerintahan Daerah: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Populis terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Desy Miranti¹, Yogie Alontari²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional

desymiranti@iwu.ac.id¹, yogiealontari@iwu.ac.id²

Article Info

Article history:

Received January 06, 2026

Revised January 13, 2026

Accepted January 19, 2026

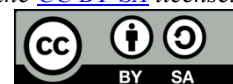
Keywords:

Political Personalization,
Populist Leadership, Public
Service, Local Government,
Bureaucracy.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of political personalization and populist leadership styles on the quality of public services in Indonesian local government. In the era of decentralization, regional heads tend to emphasize personal identity and political discretion to build legitimacy, which often intersects with technocratic principles of public administration. The research method employed is qualitative-descriptive through a library research approach. Data were collected by synthesizing literature from reputable academic journals, policy reports, and authoritative documents regarding local governance. The results indicate that populist leadership acts as a double-edged sword. On one hand, it enhances bureaucratic responsiveness in handling immediate public grievances through direct intervention. On the other hand, excessive political personalization triggers bureaucratic politicization, undermining the merit system and institutional sustainability. Public service quality becomes highly person-dependent rather than system-dependent. This study concludes that without impersonal institutional strengthening, political personalization risks distorting public accountability and creating service vulnerability during leadership transitions. The recommendations of this study emphasize the importance of bureaucratic digitalization and strengthening independent oversight to safeguard professional apparatus from personal political interference.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 06, 2026

Revised January 13, 2026

Accepted January 19, 2026

Keywords:

Personalisasi Politik,
Kepemimpinan Populis,
Pelayanan Publik,
Pemerintahan Daerah,
Birokrasi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh personalisasi politik dan gaya kepemimpinan populis terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia. Di tengah arus desentralisasi, kepala daerah cenderung menonjolkan identitas personal dan diskresi politik untuk membangun legitimasi, yang sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip administrasi publik yang teknokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui sintesis literatur dari berbagai jurnal ilmiah bereputasi, laporan kebijakan, dan dokumen otoritatif terkait tata kelola pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan populis memiliki dampak ganda (*double-edged sword*). Di satu sisi, gaya ini meningkatkan responsivitas birokrasi dalam menangani keluhan masyarakat secara instan melalui intervensi langsung. Namun, di sisi lain, personalisasi politik yang berlebihan memicu politisasi birokrasi yang melemahkan *merit system* dan keberlanjutan institusional. Kualitas pelayanan menjadi sangat

bergantung pada figur individu (*person-dependent*) daripada sistem yang mapan (*system-dependent*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa penguatan kelembagaan yang impersonal, personalisasi politik berisiko mendistorsi akuntabilitas publik dan menciptakan kerentanan layanan pada masa transisi kepemimpinan. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi dan penguatan pengawasan independen untuk menjaga profesionalisme aparatur dari intervensi politik personal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:**Desy Miranti**

Universitas Wanita Internasional

E-mail: desymiranti@iwu.ac.id

Pendahuluan

Fenomena personalisasi politik dalam tata kelola pemerintahan daerah telah menjadi determinan penting dalam dinamika demokrasi di Indonesia pasca-desentralisasi. Personalisasi politik, yang didefinisikan oleh McAllister (2007) sebagai pergeseran fokus politik dari institusi dan partai menuju figur individu, kini bertransformasi menjadi strategi kepemimpinan populis yang dominan di tingkat lokal. Urgensi pembahasan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan populis terhadap kualitas pelayanan publik terletak pada pergeseran paradigma administrasi, di mana kebijakan sering kali tidak lagi berbasis pada perencanaan teknokratis yang rigid, melainkan pada diskresi personal pemimpin demi menjaga basis dukungan elektoral (Haboddin, 2019). Pendidikan politik dan penelitian bidang pemerintahan saat ini, pemahaman mengenai bagaimana personalitas pemimpin memengaruhi efektivitas birokrasi menjadi sangat krusial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik, sebagai hak dasar warga negara, tetap berjalan di atas koridor profesionalisme meskipun berada di bawah kepemimpinan yang cenderung bersifat karismatik dan populis.

Meskipun kajian mengenai populisme di Indonesia telah berkembang pesat, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur pemerintahan daerah. Peneliti terdahulu, seperti Aspinall dan Mietzner (2019), lebih banyak menitikberatkan analisis pada dampak personalisasi politik terhadap kemenangan elektoral dan pola patronase politik. Di sisi lain, studi mengenai pelayanan publik sering kali terjebak pada evaluasi teknis operasional tanpa mempertimbangkan variabel gaya kepemimpinan sebagai intervensi politik yang sistemik. Terdapat kekosongan literatur yang secara spesifik menghubungkan bagaimana retorika populis dan personalisasi kekuasaan dapat mendistorsi prinsip *merit system* dalam birokrasi, yang pada akhirnya memengaruhi indeks kualitas pelayanan publik secara objektif. Kebanyakan studi masih bersifat kualitatif-deskriptif yang memuji efektivitas kepemimpinan personal tanpa mengkritisi keberlanjutan (*sustainability*) institusional birokrasi jangka panjang (Fukuyama, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan populis terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat daerah dengan menggunakan pendekatan teori *New Public Service* (Denhardt & Denhardt, 2015). Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi variabel personalisasi politik sebagai faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur, yang kemudian berdampak langsung pada mutu layanan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat kepemimpinan populis secara positif sebagai pemutus hambatan birokrasi, penelitian ini menawarkan perspektif kritis mengenai risiko de-institusionalisasi birokrasi akibat ketergantungan pada figur tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis baru dalam memetakan hubungan kausal antara karakter kepemimpinan politik dan performansi unit pelayanan publik di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi secara mendalam dialektika antara fenomena personalisasi politik dan gaya kepemimpinan populis terhadap dinamika kualitas pelayanan publik di tingkat daerah. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap beragam sumber literatur sekunder yang otoritatif, meliputi buku teks teori politik, artikel jurnal ilmiah bereputasi (Sinta dan Scopus), dokumen kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah, serta laporan evaluasi pelayanan publik dari lembaga pengawas seperti Ombudsman RI.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten (*content analysis*) dan sintesis konseptual. Peneliti menelaah, membandingkan, dan mengonstruksi kaitan antara narasi kepemimpinan personal dengan indikator performansi birokrasi. Secara spesifik, analisis diarahkan untuk membedah bagaimana diskresi personal pemimpin populis berinteraksi dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik. Melalui interpretasi kritis terhadap berbagai literatur tersebut, artikel ini bertujuan menghadirkan pemahaman yang komprehensif serta argumentatif mengenai risiko dan peluang de-institusionalisasi pelayanan publik akibat penguatan personalisasi politik dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Karakteristik Personalisasi Politik dalam Kepemimpinan Populis Lokal

Personalisasi politik di tingkat pemerintahan daerah di Indonesia manifestasi dari pergeseran fokus loyalitas publik, dari institusi partai politik menuju figur individu kepala daerah. Secara teoretis, McAllister (2007) menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi ketika aktor politik secara sadar menonjolkan kualitas personal, karisma, dan gaya hidup untuk membangun koneksi langsung dengan konstituen. Dalam konteks lokal, hal ini sering kali didukung oleh penggunaan media sosial yang masif, di mana kepala daerah membangun narasi sebagai sosok yang "paling memahami" penderitaan rakyat dibandingkan birokrasi yang kaku.

Gaya kepemimpinan populis yang menyertai personalisasi ini ditandai dengan retorika "anti-elit" atau "anti-prosedur" yang sering kali dianggap menghambat kemajuan. Pemimpin populis lokal cenderung menggunakan diskresi personal untuk memotong jalur birokrasi yang

panjang (*red tape*), yang dalam jangka pendek sering kali mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Namun, Haboddin (2019) mengingatkan bahwa populisme lokal sering kali bersifat karikatif dan jangka pendek, di mana kebijakan yang diambil lebih mengutamakan visibilitas politik daripada penguatan sistemik yang berkelanjutan.

Analisis literatur menunjukkan bahwa personalisasi ini menciptakan ketergantungan publik pada sosok pemimpin. Ketika legitimasi kepemimpinan didasarkan pada performa personal, seluruh keberhasilan pembangunan daerah diatribusikan kepada sang individu, bukan kepada sistem pemerintahan daerah secara kolektif. Hal ini menciptakan distorsi dalam struktur organisasi perangkat daerah, di mana aparatur sipil negara (ASN) cenderung bekerja untuk memenuhi ekspektasi personal kepala daerah demi menjaga stabilitas posisi mereka, alih-alih berpegang teguh pada rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan secara teknokratis.

2. Implikasi Gaya Populis terhadap Profesionalisme Aparatur (Politisasi Birokrasi)

Salah satu dampak paling signifikan dari personalisasi politik adalah melemahnya penerapan *merit system* dalam birokrasi daerah. Kepemimpinan populis yang kuat sering kali membawa kepentingan politik praktis ke dalam ranah administrasi publik. Roberts (2015) mencatat bahwa pemimpin populis cenderung menempatkan individu-individu yang memiliki loyalitas personal tinggi pada posisi strategis di dinas-dinas pelayanan publik. Fenomena ini dikenal sebagai politisasi birokrasi, di mana profesionalisme ASN dikalahkan oleh kepentingan untuk mengamankan agenda-agenda politik personal kepala daerah.

Dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik menjadi nyata ketika kompetensi teknis diabaikan demi loyalitas. Pejabat birokrasi yang terpilih karena kedekatan personal sering kali kurang memiliki kapasitas untuk mengelola unit layanan secara inovatif dan transparan. Selain itu, iklim kerja di internal birokrasi menjadi tidak sehat karena adanya ketakutan akan mutasi atau demosi jika tidak sejalan dengan keinginan personal pemimpin. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Fukuyama (2014) mengenai pembusukan institusi, di mana institusi negara kehilangan fungsinya yang impersonal dan terjebak dalam praktik patronase.

Lebih lanjut, politisasi ini mengakibatkan birokrasi menjadi "robot politik" yang hanya bergerak berdasarkan instruksi atasan, bukan berdasarkan kebutuhan nyata warga. Aparatur cenderung mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) yang mapan demi mengejar target-target populis yang bersifat instan, seperti penyelesaian masalah yang sifatnya kasuistik namun viral di media sosial. Akibatnya, sistem pelayanan publik yang seharusnya berjalan secara ajek dan terprediksi menjadi fluktuatif, tergantung pada suasana hati dan arah kebijakan personal sang pemimpin daerah.

3. Kontradiksi Kualitas Pelayanan Publik: Responsivitas vs. Akuntabilitas

Terdapat kontradiksi mendasar dalam kualitas pelayanan publik di bawah kepemimpinan populis. Di satu sisi, gaya kepemimpinan ini sering kali meningkatkan responsivitas birokrasi. Pemimpin yang populis biasanya menyediakan kanal pengaduan langsung dan sering melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) untuk memastikan layanan dasar berjalan dengan baik. Dari perspektif *New Public Service* (Denhardt & Denhardt, 2015), hal ini

tampak positif karena menunjukkan keberpihakan pada warga. Namun, responsivitas ini sering kali bersifat superfisial dan hanya menyasar masalah-masalah yang terlihat di permukaan.

Di sisi lain, aspek akuntabilitas dan keberlanjutan sering kali dikorbankan. Pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan stabilitas anggaran dan perencanaan jangka panjang. Kepemimpinan populis cenderung mengalihkan sumber daya daerah untuk program-program "mercusuar" yang dapat langsung dirasakan dampaknya secara visual oleh pemilih, namun kurang menyentuh akar permasalahan infrastruktur atau sistemik. Misalnya, pembiayaan untuk bantuan sosial yang masif mungkin meningkat, namun anggaran untuk peningkatan kapasitas sistem informasi pelayanan publik atau pemeliharaan aset jangka panjang justru terabaikan.

Selain itu, ketergantungan pada diskresi personal pemimpin menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelayanan publik. Ketika seorang warga mendapatkan akses layanan lebih cepat hanya karena mengadu langsung kepada kepala daerah, hal ini justru mencederai prinsip keadilan bagi warga lain yang mengikuti prosedur formal. Praktik ini secara perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi itu sendiri. Publik tidak lagi percaya pada sistem, melainkan percaya pada "kebaikan hati" sang pemimpin, yang merupakan langkah mundur bagi upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Sintesis: Dampak Jangka Panjang terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Secara argumentatif, sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa personalisasi politik dalam pemerintahan daerah merupakan pedang bermata dua. Dalam jangka pendek, gaya kepemimpinan populis mampu menggerakkan birokrasi yang inersia menjadi lebih lincah dan responsif. Namun, dalam jangka panjang, penguatan figur personal secara berlebihan justru melemahkan institusionalisasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi rapuh karena tidak memiliki fondasi sistem yang kuat dan mandiri dari intervensi politik.

Risiko terbesar muncul pada saat masa transisi kepemimpinan. Karena pelayanan publik selama ini digerakkan oleh otoritas personal, maka saat pemimpin tersebut tidak lagi menjabat, kinerja birokrasi cenderung menurun drastis karena hilangnya motor penggerak utama. Institusi yang telah ter-depersonalisasi akan sulit untuk bangkit kembali jika tidak ada sistem yang mapan. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik yang ideal seharusnya berbasis pada sistem yang impersonal dan profesional, bukan pada kemauan politik personal satu individu.

Oleh karena itu, penguatan regulasi mengenai kemandirian birokrasi dan perlindungan terhadap *merit system* menjadi harga mati untuk mengimbangi arus personalisasi politik. Kepemimpinan daerah harus tetap inovatif dan responsif, namun tetap berada dalam koridor hukum dan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama. Tanpa adanya keseimbangan antara kekuatan personalitas dan kekuatan sistemik, kualitas pelayanan publik di daerah hanya akan menjadi komoditas politik yang bersifat musiman dan tidak akan pernah mencapai standar kualitas yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa personalisasi politik melalui gaya kepemimpinan populis memiliki pengaruh yang ambivalen terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan daerah. Di satu sisi, kepemimpinan populis terbukti efektif dalam meningkatkan responsivitas birokrasi terhadap masalah-masalah kasuistik dan mendesak melalui jalur diskresi personal yang mampu memotong hambatan prosedural (*red tape*). Namun, di sisi lain, penguatan personalisasi ini secara sistemik melemahkan profesionalisme birokrasi dan keberlanjutan tata kelola. Ketergantungan pada figur pemimpin mengakibatkan pelayanan publik menjadi tidak stabil dan rentan terhadap politisasi, di mana loyalitas personal sering kali mengungguli kompetensi teknis dalam sistem meritokrasi.

Lebih lanjut, temuan dari studi pustaka ini menunjukkan bahwa kepemimpinan populis cenderung mengutamakan program-program pelayanan yang bersifat visual dan karikatif demi menjaga elektabilitas, namun sering kali mengabaikan penguatan infrastruktur pelayanan yang bersifat fundamental dan jangka panjang. Akibatnya, kualitas pelayanan publik yang dihasilkan cenderung bersifat superfisial dan tidak memiliki daya tahan institusional. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik yang ideal seharusnya dibangun di atas kekuatan sistem yang impersonal dan mandiri, bukan sekadar bergantung pada kehendak politik personal seorang kepala daerah.

Daftar Pustaka

- Amin, M. (2020). *Pengaruh profesionalisme aparatur terhadap kualitas pelayanan publik bidang administrasi pemerintahan*. Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis), 1(2), 137–152.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia*. Journal of Democracy, 30(4), 104–118.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Haboddin, M. (2019). *Populisme sebagai bentuk politik pertahanan pemimpin lokal*. Jurnal Politik Walisongo, 4(1), 23–44.
- McAllister, I. (2007). *The personalization of politics*. In R. J. Dalton & H. D. Klingemann (Eds.), *The Oxford handbook of political behavior* (pp. 571–588). Oxford University Press.
- Moffitt, B. (2016). *The global rise of populism: Performance, political style, and representation*. Stanford University Press.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.

- Ode, S. (2020). *Kepemimpinan inovatif kepala daerah di era pandemi Covid-19: Studi kasus Walikota Semarang*, Hendrar Prihadi. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 6(1), 38–56.
- Putri, D. K., & Endarti, E. W. (2024). *Analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dimediasi oleh kinerja aparatur*. *Journal of Management and Creative Business*, 2(2), 247–268.
- Rahat, G., & Sheafer, T. (2007). *The personalization of politics: Over time and across types*. *Party Politics*, 13(1), 65–84.
- Roberts, K. M. (2015). *Populism, social movements, and popular mobilization*. In C. de la Torre (Ed.), *The promise and perils of populism: Global perspectives* (pp. 140–158). University Press of Kentucky.